

PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA 2017



The top section features two stylized figures: a construction worker on the left wearing a hard hat and overalls, and a manager on the right in a suit and tie holding a clipboard. They are surrounded by various icons including gears, a wrench, a lightbulb, a crane, and a building.

PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA 2017



Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2017

Labor Force Papua Province 2017

ISSN : 2477-4553
No. Publikasi/*Publication Number* : 94520.1801
Katalog/*Catalog* : 2303003.94

Ukuran Buku/*Book Size* : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman/*Number of Pages* : x + 86 halaman/*pages*

Naskah/*Manuscript*:
Bidang Statistik Sosial
Social Statistics Division

Penyunting/*Editor*:
Bidang Statistik Sosial
Social Statistics Division

Desain Kover oleh/*Cover Designed by*:
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Integrated Processing and Statistics Dissemination Division

Penerbit/*Published by*:
© BPS Provinsi Papua/*BPS-Statistics Papua Province*

Pencetak/*Printed by*:
CV. Mitra Karya Pura

Sumber Ilustrasi/*Graphics by*: freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik
Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua setiap tahun menerbitkan Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Profil Ketenagakerjaan ini disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017. Profil Ketenagakerjaan berisi informasi seputar keadaan tenaga kerja di Provinsi Papua.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran fenomena sosial terutama di bidang tenaga kerja dan gambaran tentang capaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dan memberi perhatian sehingga publikasi ini bisa terwujud dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Saran dan masukan sangat diharapkan guna menyempurnakan penerbitan publikasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Besar harapan kami semoga buku ini bermanfaat untuk semua, terimakasih.

Jayapura, Mei 2018

Kepala BPS Provinsi Papua



Drs. Simon Sapary, M.Sc

NIP. 19660607 1993020 1 001

ORGANISASI PENULISAN

Penanggung Jawab

Simon Sapary, M.Sc

Editor

Bagas Susilo, M.Si

Penulis dan Pengolah Data

Paul Santoso, S.ST

Rut M. Nirmala Nadapdap, SST

Layout

Paul Santoso, S.ST

Rut M. Nirmala Nadapdap, SST

Desain Cover

M. Tobroni, S.ST

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Organisasi Penulisan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Konsep dan Definisi	7
Bab III Penduduk Usia Kerja.....	19
3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	21
3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota.....	23
3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama.....	25
Bab IV Penduduk Angkatan Kerja.....	29
4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	31
4.2 Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota.....	32
4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	34
Bab V Penduduk Bekerja.....	37
5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur.....	39
5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota.....	41
5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	43
5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	46
5.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja	52

5.6	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan	55
5.7	Penduduk Bekerja menurut Sektor Formal Informal.....	65
Bab VI Pengangguran		61
6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur	63
6.2	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota	64
6.3	Pengangguran menurut Keegiatannya	66
6.4	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan	67
6.5	Setengah Pengangguran	69
Bab VII Indikator Ketenagakerjaan.....		71
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	73
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	76
7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).....	78
7.4	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja	80
7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja.....	81
Bab VIII Kesimpulan		82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2017	22
Tabel 3.2	Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	24
Tabel 3.3	Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017.....	27
Tabel 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017.....	33
Tabel 4.2	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2017	35
Tabel 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	42
Tabel 5.2	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2017	44
Tabel 5.3	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2017	47
Tabel 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2017	48
Tabel 5.5	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2017	51
Tabel 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2017.....	52
Tabel 5.7	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2017	54

Tabel 6.1	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	65
Tabel 6.2	Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	66
Tabel 7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	75
Tabel 7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	77
Tabel 7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	79
Tabel 7.4	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2012-2017	80
Tabel 7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Tahun 2017	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Ketenagakerjaan Sakernas.....	9
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2017	25
Gambar 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2017.....	32
Gambar 4.2	Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017	34
Gambar 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2017.....	40
Gambar 5.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2017.....	41
Gambar 5.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2016	43
Gambar 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2017	43
Gambar 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017	50
Gambar 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2017.....	53
Gambar 5.7	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	55
Gambar 5.8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2016.....	57

Gambar 5.9	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017	58
Gambar 5.10	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	59
Gambar 5.11	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2017.....	60
Gambar 6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	64
Gambar 6.2	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2017	68
Gambar 6.3	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017.....	69
Gambar 6.4	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2017	70
Gambar 7.1	TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017	74

<https://papua.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu wilayah, penduduk dan Ketenagakerjaan merupakan komponen penting. Jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, angka pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketenagakerjaan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, dan sebaliknya semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, strategi/perencanaan di bidang ketenagakerjaan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, data yang terkait dengan ketenagakerjaan perlu disediakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.

Badan Pusat Statistik sebagai instansi penyedia data berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Pelaksanaan Sakernas tahun 2017 dilakukan secara semesteran, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Secara umum SAKERNAS yang dilaksanakan pada semester 1 dapat digunakan untuk mengestimasi keadaan tenaga kerja sampai level provinsi. Sementara itu, khusus untuk semester 2 (Agustus) dapat menyajikan data sampai level kabupaten/kota. Dari sisi penimbang (*weight*), indikator ketenagakerjaan dalam publikasi ini telah menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi.

*Dari sisi penimbang (*weight*), indikator ketenagakerjaan dalam publikasi ini telah menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi*

Melalui survei ini dapat diperoleh gambaran umum ketenagakerjaan seperti jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah

pengangguran, tingkat penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, dan status pekerjaan dari penduduk yang bekerja. Selain itu, indikator-indikator penting ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dapat diketahui.

Provinsi Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/kota mempunyai permasalahan ketenagakerjaan yang terbilang kompleks. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah angkatan kerja maupun penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat tahun 2015 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.741.945 meningkat menjadi 1.722.162 pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 menjadi 1.762.841. Pada periode 2016 menuju 2017, angka pengangguran meningkat dari 3,35 persen menjadi 3,62 persen. Secara umum, tingkat pengangguran di Papua masih tergolong rendah dan bahkan lebih rendah dibanding angka nasional (5,50 persen). Kondisi ini semestinya menjadi kondisi ideal untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, kenyataan yang terjadi bukanlah demikian. Walaupun angka pengangguran terbilang rendah dan angkatan kerja yang tersedia dalam jumlah yang banyak, tidak serta merta berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Di tingkat nasional, Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 27,76 persen (kondisi September 2017).

Permasalahan mendasar yang dihadapi Papua di bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Pendidikan dan keahlian rendah, jenis pekerjaan yang dilakukan pun adalah yang tidak membutuhkan *skill* tinggi, seperti

Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua tergolong rendah, bahkan lebih rendah dibanding angka nasional.

Permasalahan mendasar ketenagakerjaan di Papua adalah rendahnya kualitas tenaga kerja.

bertani. Dampaknya pendapatan yang diterima juga relatif kecil. Hal inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Papua.

Publikasi ini rutin disusun setiap tahun untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Papua. Selain itu, dalam publikasi ini juga memuat penjelasan, konsep dan definisi juga istilah-istilah (terminologi) ketenagakerjaan, sehingga pembaca dapat lebih memahami data dan informasi yang disajikan.

1.2 Ruang Lingkup

Publikasi Profil Ketenagakerjaan di Provinsi Papua 2017 disusun dari data SAKERNAS bulan Agustus 2017. Pembahasan dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten/kota, mengingat kecukupan jumlah sampel hanya untuk estimasi sampai level Kabupaten/Kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum publikasi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui komposisi penduduk usia kerja dirinci menurut jenis kelamin, jenis kegiatan, dan kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik angkatan kerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, dan sektor formal/informal;
- Mengetahui karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan jenis kegiatan;
- Mengetahui indikator ketenagakerjaan di Provinsi Papua.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari delapan bab, dijabarkan sebagai berikut:

Bab I. Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan.

Bab III. Membahas tentang karakteristik penduduk usia kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan kegiatan terbanyak selama seminggu yang lalu.

Bab IV. Berisi tentang karakteristik angkatan kerja, termasuk didalamnya bukan angkatan kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan.

Bab V. Menjelaskan tentang kondisi penduduk yang bekerja yang dirinci menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jumlah jam kerja.

Bab VI. Berisi karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan.

Bab VII. Membahas tentang perkembangan dari beberapa indikator ketenagakerjaan, meliputi: TPAK, TPT, dan TKK.

Bab VIII. Kesimpulan

<https://papua.bps.go.id>

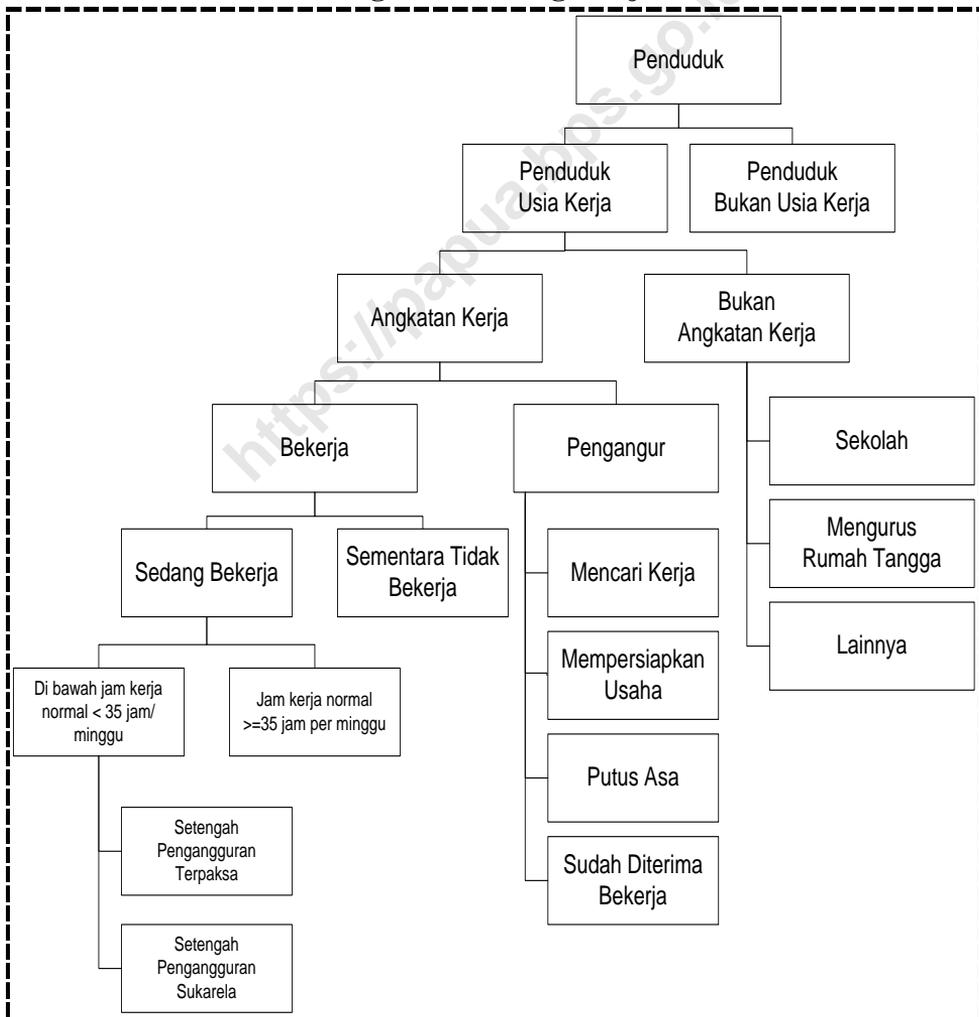
BAB 2

KONSEP DAN DEFINISI

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Konsep tersebut dapat digambarkan dalam diagram ketenagakerjaan berikut:

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan Sakernas



Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

2.1 Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

2.2 Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2.3 Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. Mulai tahun 2011, mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja dikategorikan sebagai pengangguran (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Contoh:

- a. Pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).
- c. Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya. **Misalnya:** dalang, tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya.

Klasifikasi Formal–Informal,

Beberapa pihak, mendefinisikan kegiatan informal hanya berdasarkan status pekerjaan, namun dalam publikasi ini, pendekatan batasan kegiatan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada bagan berikut :

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Non Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Note : F = Formal

INF=Informal

2.4 Penduduk Pengangguran

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
(lihat pada *“An ILO Manual on Concepts and Methods”*)

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebaskan tugas, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang **“baru”**, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila **“tindakannya nyata”**, seperti : mengumpulkan

modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/ tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan :

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:

- a. **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- b. **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

2.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang tidak termasuk Angkatan Kerja yang dibedakan menurut jenis kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak antara lain sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

- a. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan.
- b. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- c. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.

2.6 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

2.7 Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan, dan sebagainya.

2.8 Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.

2.9 Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan ini mengikuti KBJI (Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia) 2002 yang mengacu pada ISCO 88.

Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

2.10 Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu :

- a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai

buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi : usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa masyarakat, sosial, dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).
- g. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari :

- Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah.
- Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung.
- Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

<https://papua.bps.go.id>

KEGIATAN UTAMA PENDUDUK USIA KERJA DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2017



BAB 3

PENDUDUK USIA KERJA

BAB III

PENDUDUK USIA KERJA

3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Dalam istilah ketenagakerjaan, penduduk usia kerja biasa disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dari sisi usia dipandang telah mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Banyaknya tenaga kerja menyimpan potensi ekonomi yang dimiliki suatu wilayah. Mereka yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja biasa disebut dengan angkatan kerja. Sementara itu mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lain tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Batasan umur yang digunakan Indonesia dalam mengelompokkan penduduk usia kerja mengacu pada konsep *International Labour Organization (ILO)*, yaitu 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun digolongkan sebagai penduduk bukan usia kerja.

Jumlah penduduk usia kerja di Papua tahun 2017 sebesar 2,291,111 orang

Pada tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua mencapai 2.291.111 orang. Sekitar 77,75 persennya didominasi oleh penduduk usia muda (15 sampai 44 tahun). Sementara itu sekitar 24,25 persen merupakan penduduk berumur 45 tahun ke atas. *Supply* tenaga muda yang besar ini menjadi potensi yang luar biasa jika diiringi dengan peningkatan kualitas berupa keahlian dan keterampilan.

Secara umum persentase penduduk usia kerja laki-laki (53,24 persen) lebih banyak dibanding perempuan (46,76 persen).

Penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Hal ini sejalan dengan rasio jenis kelamin di Papua di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jika dilihat menurut kelompok umur pada tabel 3.1, persentase terbesar penduduk usia kerja didominasi oleh kelompok umur 30-34 tahun yang mencapai 14,34 persen.

Tabel 3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Usia Kerja		Jumlah	Persentase Penduduk Usia Kerja		Persentase Kelompok Umur
	L	P		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	176 078	129 600	305 678	14,44	12,10	13,34
20-24	117 724	119 776	237 500	9,65	11,18	10,37
25-29	144 769	151 769	296 538	11,87	14,17	12,94
30-34	168 239	160 264	328 503	13,79	14,96	14,34
35-39	169 531	151 272	320 803	13,90	14,12	14,00
40-44	130 852	115 617	246 469	10,73	10,79	10,76
45-49	116 525	95 605	212 130	9,55	8,92	9,26
50-54	80 478	63 508	143 986	6,60	5,93	6,28
55-59	52 004	37 655	89 659	4,26	3,51	3,91
60-64	34 899	25 255	60 154	2,86	2,36	2,63
65+	28 579	21 112	49 691	2,34	1,97	2,17
Jumlah	1 219 678	1 071 433	2 291 111	100	100	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Dominasi peran penduduk usia muda merupakan sebuah keuntungan sekaligus menjadi *big opportunity* bagi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai pendidikan dan keterampilannya, sehingga bukan hanya dominan dalam hal jumlah namun juga dalam kualitas. Kualitas tenaga kerja inilah yang menjadi *point* penting dalam meningkatkan produktivitas kerja yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Usaha ini dapat dilakukan antara lain dengan membekali mereka dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, dan sesuai dengan dunia usaha yang membutuhkan.

3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk usia kerja umumnya sebanding dengan jumlah penduduknya. Sebaran jumlah penduduk usia kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2017 tersaji pada Tabel 3.2 berikut. Jumlah penduduk usia kerja paling tinggi berada di Kota Jayapura yaitu sebanyak 221.985 orang atau sekitar 9,69 persen penduduk usia kerja di Papua. Sedangkan Kabupaten Supiori menyumbangkan penduduk usia kerja paling sedikit, yaitu 12.452 orang atau sekitar 0,54 persen dari seluruh jumlah penduduk usia kerja di Papua. Selanjutnya jika ditinjau menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Keadaan ini merata hampir di seluruh Kabupaten/Kota.

Penduduk usia kerja paling tinggi terdapat di Kota Jayapura dan terendah di Kabupaten Supiori.

Tabel 3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	83 979	77 031	161 010	7,03
Jayawijaya	81 084	75 839	156 923	6,85
Kab. Jayapura	48 695	41 943	90 638	3,96
Nabire	57 166	48 133	105 299	4,60
Kepulauan Yapen	33 714	31 438	65 152	2,84
Biak Numfor	52 791	48 604	101 395	4,43
Paniai	61 238	56 809	118 047	5,15
Puncak Jaya	51 389	41 006	92 395	4,03
Mimika	88 667	62 750	151 417	6,61
Boven Digoel	25 309	19 824	45 133	1,97
Mappi	30 712	29 563	60 275	2,63
Asmat	29 951	28 275	58 226	2,54
Yahukimo	65 674	61 680	127 354	5,56
Pegunungan Bintang	25 777	23 447	49 224	2,15
Tolikara	50 782	43 262	94 044	4,10
Sarmi	14 951	12 132	27 083	1,18
Keerom	22 008	17 798	39 806	1,74
Waropen	10 561	9 783	20 344	0,89
Supiori	6 470	5 982	12 452	0,54
Mamberamo Raya	7 285	6 735	14 020	0,61
Nduga	34 435	28 147	62 582	2,73
Lanny Jaya	63 822	57 012	120 834	5,27
Mamberamo Tengah	16 995	15 515	32 510	1,42
Yalimo	23 151	20 038	43 189	1,89
Puncak	39 114	35 714	74 828	3,27
Dogiyai	30 991	31 666	62 657	2,73
Intan Jaya	17 047	16 529	33 576	1,47
Deiyai	24 598	24 115	48 713	2,13
Kota Jayapura	121 322	100 663	221 985	9,69
Jumlah (Papua)	1 219 678	1 071 433	2 291 111	100,00

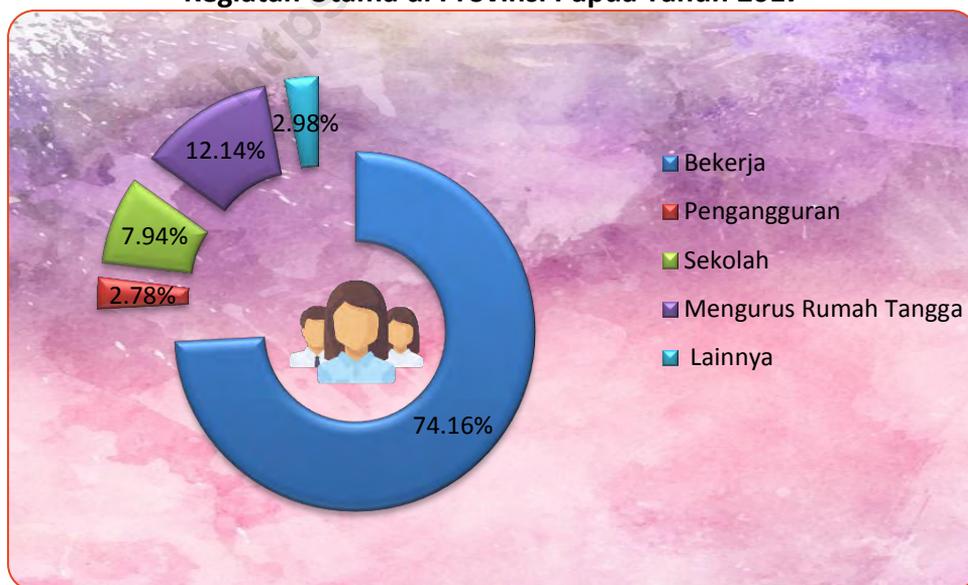
Sumber: Sakernas, Agustus 2017

3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama

Berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif secara ekonomi dalam pasar kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

Konsep ini mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kondisi secara umum yang terjadi di Indonesia termasuk Papua adalah banyak ditemukan adanya pekerja anak (15 tahun ke bawah). Meskipun mereka aktif secara ekonomi, namun mereka tidak digolongkan sebagai angkatan kerja karena tidak memenuhi konsep batasan umur penduduk usia kerja. Kedua, masih menganut asas eksklusivitas di mana seorang penduduk hanya dapat digolongkan dalam satu kategori. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mereka hanya dapat dimasukkan dalam salah satu kategori, bekerja atau sekolah. Meskipun pada kenyataannya mereka melakukan kedua kegiatan tersebut.

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2017



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, diketahui bahwa kegiatan utama sebagian besar penduduk Papua yang berusia 15 tahun ke atas adalah bekerja (74,16 persen). Sementara itu, persentase penduduk yang menganggur sebanyak 2,78 persen. Selanjutnya sebanyak 23,06 persen penduduk usia kerja tidak terlibat secara aktif dalam perekonomian, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga, sekolah, dan melakukan kegiatan lainnya masing-masing sebesar 12,14 persen, 7,94 persen, dan 2,98 persen.

- *Sebagian besar penduduk usia kerja berpendidikan sangat rendah*
- *Tingkat pendidikan perempuan relatif lebih rendah dibanding laki-laki*

Salah satu ukuran kualitas penduduk usia kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Pada tabel 3.3 lebih dari setengah penduduk usia kerja masih berpendidikan rendah. Ada sebanyak 35,70 persen penduduk usia kerja adalah mereka yang belum tamat SD atau bahkan belum pernah bersekolah, selanjutnya sebanyak 17,32 persen berpendidikan SD. Sementara itu, penduduk usia kerja yang berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) hanya 8,04 persen.

Sejalan dengan hal itu, jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan usia kerja yang berpendidikan di bawah SD (55,3 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini juga berlaku untuk pendidikan SD ke atas, secara persentase pendidikan perempuan kalah dibanding laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa di Papua secara umum penduduk usia kerja berjenis kelamin laki-laki mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
di bawah SD	365 571	452 410	817 981
(persentase)	44 ,7%	55 ,3%	100 ,0%
SD	202 657	194 124	396 781
(persentase)	51 ,1%	48 ,9%	100 ,0%
SLTP	218 372	162 226	380 598
(persentase)	57 ,4%	42 ,6%	100 ,0%
SLTA	323 071	188 416	511 487
(persentase)	63 ,2%	36 ,8%	100 ,0%
PT	110 007	74 257	184 264
(persentase)	59 ,7%	40 ,3%	100 ,0%
Total	1 219 678	1 071 433	2 291 111
(persentase)	53 ,24%	46 ,76%	100%

Sumber: Sakernas, Agustus 2017



BAB 4

PENDUDUK ANGKATAN KERJA

BAB IV

PENDUDUK ANGKATAN KERJA

4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Jumlah penduduk angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian. Aktif di sini berarti bahwa mereka berusaha untuk menghasilkan/memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran. Pengangguran tetap digolongkan ke dalam angkatan kerja karena meskipun mereka belum menghasilkan pendapatan, namun mereka berusaha mendapatkan pekerjaan.

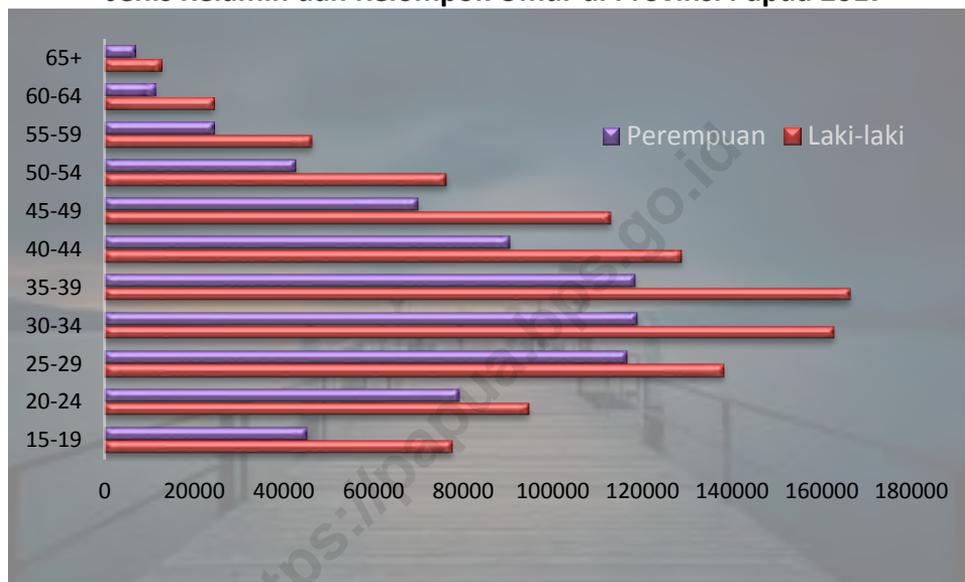
Pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua mencapai 1.762.841 orang. Hampir 59,01 persen dari jumlah tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya 40,99 persen adalah perempuan. Tidak dapat dipungkiri walaupun jumlah penduduk usia kerja antara laki-laki dan perempuan secara jumlah tidak terpaut jauh, namun kenyataannya laki-laki lebih banyak terlibat secara aktif dalam ekonomi dibanding perempuan. Sekitar 12,14 persen perempuan yang termasuk usia kerja lebih memilih mengurus rumah tangga daripada terlibat secara aktif dalam perekonomian.

- *Jumlah angkatan kerja di Papua tahun 2017 sebesar 1.762.841 orang.*
- *Angkatan kerja paling banyak terdapat pada kelompok umur 35-39 tahun.*

Umur akan sangat mempengaruhi penduduk saat memutuskan untuk masuk ke dalam pasar kerja atau tidak. Pada kelompok usia muda (15-19 tahun), sebagian besar penduduk cenderung memilih bekerja daripada sekolah. Dengan semakin meningkatnya umur, maka makin banyak penduduk yang aktif dalam perekonomian, sampai mencapai puncaknya pada usia 35-39 tahun (16,15 persen). Dan selanjutnya jumlah angkatan kerja akan kembali menurun seiring dengan banyaknya

penduduk yang meninggalkan pasar kerja karena telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja. Gambaran mengenai jumlah penduduk angkatan kerja yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tersaji pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua 2017



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

4.2 Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota

Sebaran angkatan kerja menurut kabupaten/kota di Papua tidak tergantung pada jumlah penduduk usia kerjanya, meskipun secara umum berlaku demikian. Jumlah penduduk usia kerja yang unggul secara kuantitas, seperti di daerah perkotaan tidak serta merta memiliki jumlah angkatan kerja yang besar pula. Tabel 4.1 di bawah menyajikan jumlah angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2017.

Angkatan kerja paling tinggi terdapat di Kabupaten Jayawijaya yaitu sebanyak 140.906 orang. Sedangkan angkatan kerja paling kecil dengan jumlah 8.765 orang berada di Kabupaten Supiori . Pada daerah perkotaan jumlah penduduk angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-

laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada daerah perdesaan.

Tabel 4.1 Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

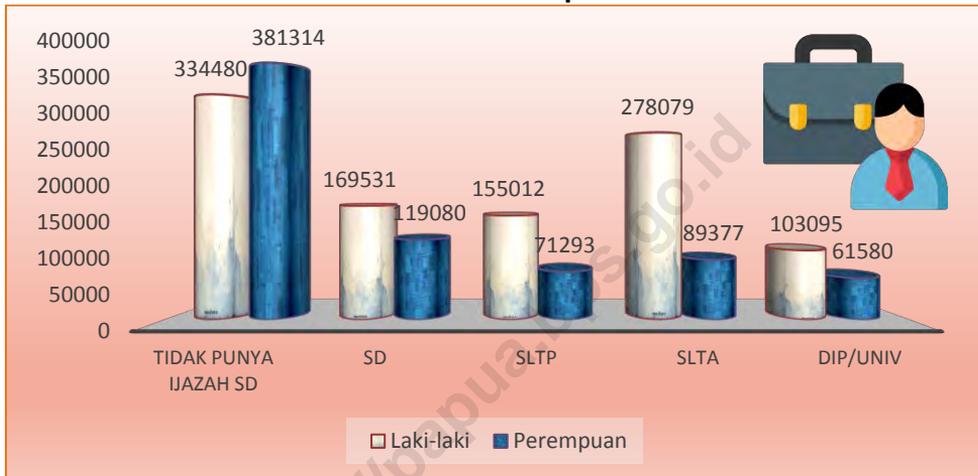
Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	68 604	33 835	102 439
Jayawijaya	74 934	65 972	140 906
Kab. Jayapura	34 892	15 427	50 319
Nabire	46 031	25 669	71 700
Kepulauan Yapen	27 032	17 066	44 098
Biak Numfor	39 347	22 471	61 818
Paniai	55 663	51 037	106 700
Puncak Jaya	47 005	35 960	82 965
Mimika	74 803	24 876	99 679
Boven Digoel	20 963	10 719	31 682
Mappi	27 377	22 409	49 786
Asmat	27 110	21 533	48 643
Yahukimo	61 090	49 975	111 065
Pegunungan Bintang	23 960	20 747	44 707
Tolikara	46 969	38 196	85 165
Sarmi	12 826	6 688	19 514
Keerom	18 683	10 999	29 682
Waropen	8 397	2 782	11 179
Supiori	5 405	3 360	8 765
Mamberamo Raya	6 388	3 863	10 251
Nduga	31 556	25 948	57 504
Lanny Jaya	58 645	54 461	113 106
Mamberamo Tengah	15 963	15 065	31 028
Yalimo	14 011	10 815	24 826
Puncak	36 889	32 013	68 902
Dogiyai	28 278	27 900	56 178
Intan Jaya	15 369	10 397	25 766
Deiyai	22 385	19 986	42 371
Kota Jayapura	89 622	42 475	132 097
Jumlah (Papua)	1 040 197	722 644	1 762 841

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pendidikannya. Gambaran mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua terdapat pada Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.2 Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Secara umum kualitas angkatan kerja di Papua masih rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar angkatan kerja di Papua didominasi oleh pendidikan lebih rendah dari SD. Penduduk angkatan kerja yang tidak tamat SD atau yang tidak punya ijazah SD pada tahun 2017 sejumlah 715.794 (40,60 persen). Sedangkan angkatan kerja dengan pendidikan terkecil berada pada jenjang Diploma/Universitas, yakni 164.675 (9,34 persen).

Selain itu, ketimpangan gender dalam hal pendidikan juga masih terlihat. Dari Gambar di atas kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Dari penduduk angkatan kerja yang tidak memiliki ijazah SD ternyata 53,27 persennya didominasi oleh perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan terlihat bahwa laki-laki lebih beruntung dalam mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Hal ini jelas tergambar dengan adanya *gap selisih* yang besar senilai 51,35 persen pada pendidikan SLTA yang menunjukkan kesempatan perempuan mendapat pendidikan SLTA masih

sangat rendah dibandingkan laki-laki. Potret keadaan pendidikan angkatan kerja ini hendaknya dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dalam bidang pendidikan terutama bagi perempuan.

Tabel 4.2 Persentase Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua 2017

Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	15,52	21,18	19,02	44,28	100,00
Jayawijaya	53,72	11,39	10,89	24,00	100,00
Kab. Jayapura	8,14	11,36	18,57	61,93	100,00
Nabire	11,57	19,10	21,08	48,25	100,00
Kepulauan Yapen	14,04	20,64	14,82	50,50	100,00
Biak Numfor	6,63	18,92	19,74	54,71	100,00
Paniai	57,21	6,18	11,39	25,22	100,00
Puncak Jaya	39,30	31,28	16,80	12,62	100,00
Mimika	7,25	14,37	17,44	60,94	100,00
Boven Digoel	17,39	25,46	20,10	37,05	100,00
Mappi	33,34	32,81	14,17	19,68	100,00
Asmat	54,53	31,34	9,15	4,98	100,00
Yahukimo	58,15	26,81	7,79	7,25	100,00
Pegunungan Bintang	64,49	17,21	6,57	11,73	100,00
Tolikara	61,52	11,83	10,74	15,91	100,00
Sarmi	17,81	23,58	16,20	42,41	100,00
Keerom	27,88	26,00	13,60	32,52	100,00
Waropen	6,01	19,10	20,51	54,38	100,00
Supiori	14,59	22,58	25,73	37,10	100,00
Mamberamo Raya	31,90	35,89	19,76	12,45	100,00
Nduga	79,38	10,55	6,65	3,42	100,00
Lanny Jaya	79,64	4,39	6,31	9,66	100,00
Mamberamo Tengah	65,26	14,00	12,37	8,38	100,00
Yalimo	54,93	13,34	12,37	19,36	100,00
Puncak	57,82	9,48	10,46	22,24	100,00
Dogiyai	55,25	18,99	14,83	10,93	100,00
Intan Jaya	59,12	9,71	12,61	18,56	100,00
Deiyai	61,75	9,48	13,35	15,42	100,00
Kota Jayapura	5,58	10,65	7,65	76,12	100,00
Jumlah (Papua)	40,60	16,37	12,84	30,19	100,00

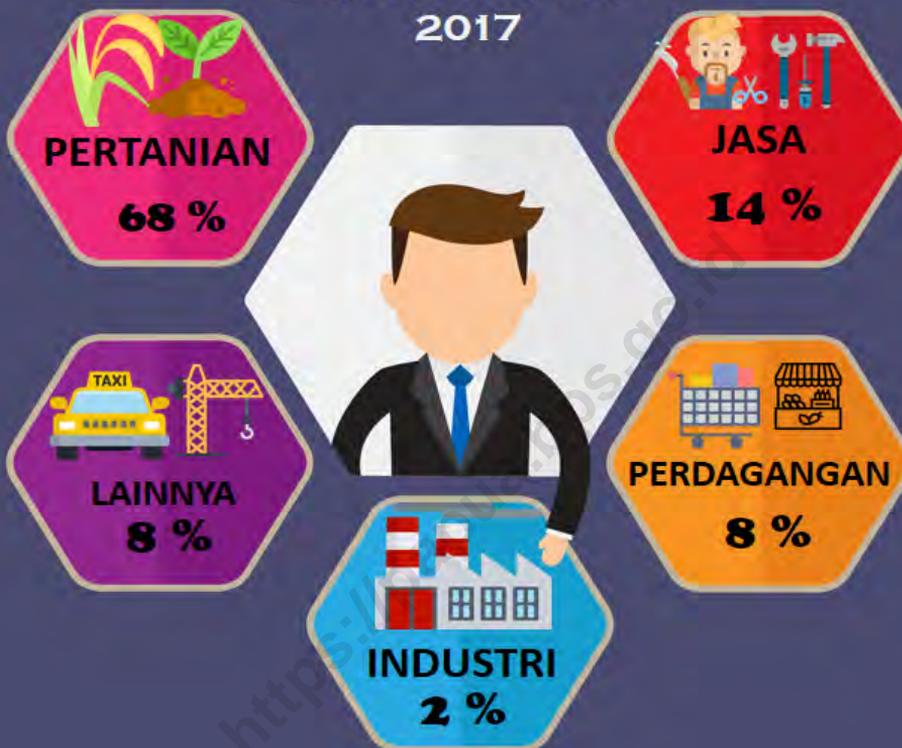
Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Walaupun masih banyak kabupaten/kota yang memiliki angkatan kerja dengan pendidikan tidak tamat SD atau tidak memiliki ijazah SD, namun dari tabel 4.2 ada beberapa kabupaten/kota yang menyumbangkan angkatan kerja dengan jenjang tidak tamat SD terkecil. Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Jayapura (8,14 persen), Kabupaten Biak Numfor (6,63 persen), Kabupaten Mimika (7,25 persen), Kabupaten Waropen (6,01 persen), dan Kota Jayapura (5,58 persen). Di sisi lain, Kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan memiliki angkatan kerja dengan pendidikan tidak tamat SD lebih dari separuh penduduknya. Ditandai oleh Kabupaten Lanny Jaya yang memimpin angka terbesar untuk angkatan kerja tidak tamat SD senilai 79,64 persen. Angka yang tinggi tersebut ditengarai akibat masih minimnya fasilitas pendidikan yang bukan hanya pada wilayah pemekaran dari kabupaten Jayawijaya tersebut namun juga pada kabupaten-kabupaten lain yang berada di daerah pegunungan.

Sementara itu, kabupaten dengan angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas cukup tinggi antara lain: Kota Jayapura (76,12 persen), Kabupaten Jayapura (61,93 persen), dan Kabupaten Mimika (60,94 persen). Ketiga daerah ini relatif lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Selain itu, sebagai daerah yang berstatus kota dan Kabupaten induk biasanya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan juga relatif lebih tinggi.

Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika mempunyai persentase angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas yang cukup tinggi

PENDUDUK BEKERJA MENURUT
LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA
PROVINSI PAPUA
2017



BAB 5

PENDUDUK BEKERJA

BAB V

PENDUDUK BEKERJA

5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

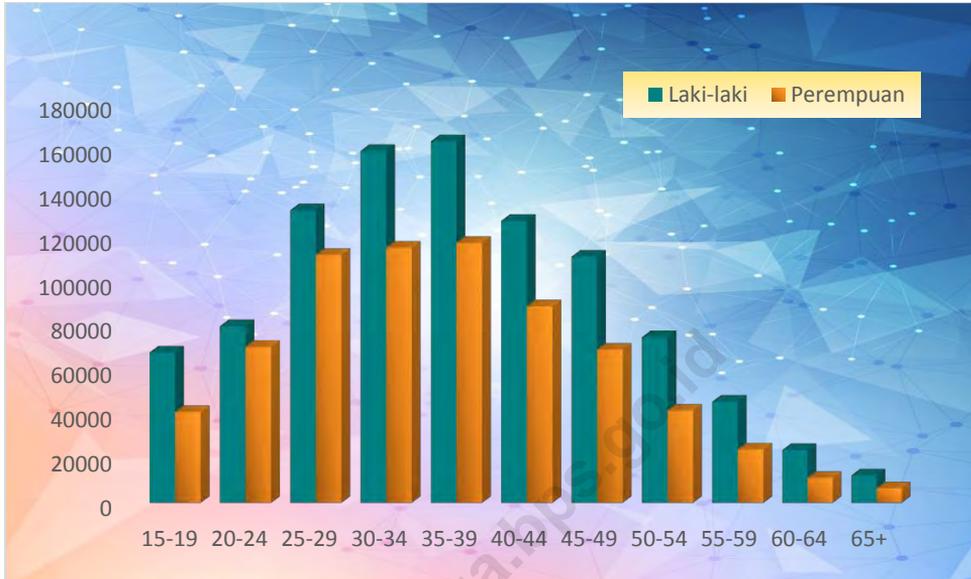
Dalam menganalisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut kelompok umur. Tujuannya adalah untuk melihat kontribusi pekerja berdasarkan kelompok umur dalam dunia pasar kerja. Idealnya, mayoritas penduduk yang bekerja dalam pasar kerja adalah mereka yang berusia prima. Namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi rumah tangga dan keluarga.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua sebanyak 1.699.071 orang atau setara 96,38 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada. Dari jumlah penduduk yang bekerja sekitar 58,82 persen adalah laki-laki, sementara sisanya 41,18 persen adalah perempuan. Sementara itu, distribusi penduduk yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari Gambar 5.1 berikut.

Secara umum penduduk yang bekerja pada setiap kelompok umur memiliki pola yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pada kelompok umur muda belum banyak penduduk yang terjun ke pasar kerja. Hal ini disebabkan karena mereka lebih cenderung memilih untuk bersekolah dibanding bekerja. Penduduk bekerja dengan jumlah terbanyak berada di rentang usia 35-39 tahun, yaitu sebesar 280.862 orang atau sekitar 16,53 persen. Sedangkan pekerja usia tua (55 tahun ke atas) yang masih aktif bekerja ada sebanyak 1,12 persen.

Penduduk bekerja di Papua paling banyak berada pada kelompok usia 35-39

Gambar 5.1 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

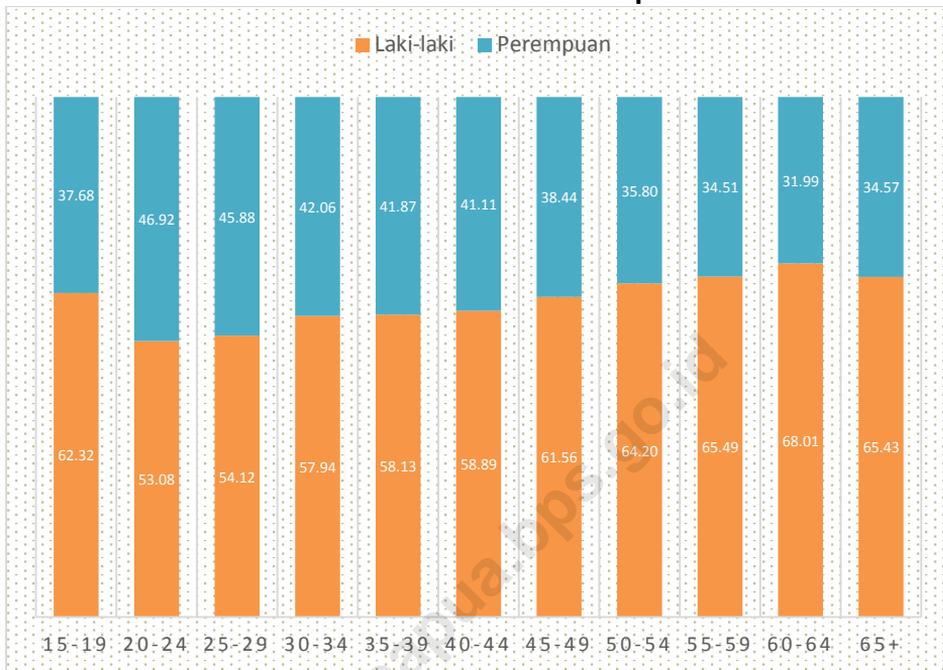


Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Selain itu, dari Gambar di atas juga menunjukkan bahwa penduduk usia kerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini berlaku pada setiap kelompok umur, jumlah dan persentase pekerja perempuan berada di bawah laki-laki.

Sejalan dengan kondisi tersebut, persentase perempuan yang terlibat dalam dunia kerja juga mengalami penurunan seiring dengan peningkatan umurnya. Sebaliknya, persentase laki-laki yang bekerja pada setiap kelompok umur justru mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi tampak pada kelompok usia 45-49 tahun, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja berturut-turut adalah 61,56 persen dan 38,44 persen. Kemudian pada kelompok usia 60 tahun ke atas persentasenya menjadi 70 persen dan 30 persen. Persentase penduduk bekerja menurut jenis kelamin pada setiap kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 5.2 di bawah ini.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota

Pola sebaran penduduk bekerja di Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota sama dengan pola sebaran angkatan kerja yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Daerah dengan jumlah penduduk bekerja paling tinggi terdapat pada Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya menempati urutan pertama untuk penduduk bekerja terbanyak, yaitu sebesar 140.070 orang atau 8,24 persen dari total seluruh penduduk bekerja se-Papua. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk bekerja paling sedikit adalah Kabupaten Supiori, yaitu 8.280 orang atau sekitar 0,49 persen.

**Tabel 5.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2017**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	67 264	31 936	99 200
Jayawijaya	74 353	65 717	140 070
Kab. Jayapura	30 015	13 568	43 583
Nabire	41 607	24 122	65 729
Kepulauan Yapen	25 839	16 156	41 995
Biak Numfor	37 043	20 245	57 288
Paniai	55 534	50 773	106 307
Puncak Jaya	46 902	35 517	82 419
Mimika	69 098	22 907	92 005
Boven Digoel	19 937	10 099	30 036
Mappi	25 805	20 800	46 605
Asmat	26 962	21 533	48 495
Yahukimo	61 090	49 975	111 065
Pegunungan Bintang	23 296	20 239	43 535
Tolikara	46 344	38 073	84 417
Sarmi	11 800	6 148	17 948
Keerom	17 844	10 689	28 533
Waropen	8 118	2 663	10 781
Supiori	5 119	3 161	8 280
Mamberamo Raya	6 151	3 386	9 537
Nduga	30 771	25 750	56 521
Lanny Jaya	58 143	54 461	112 604
Mamberamo Tengah	15 963	15 065	31 028
Yalimo	13 436	10 430	23 866
Puncak	36 646	31 834	68 480
Dogiyai	27 851	27 900	55 751
Intan Jaya	15 312	10 165	25 477
Deiyai	21 946	19 842	41 788
Kota Jayapura	79 121	36 607	115 728
Jumlah (Papua)	999 310	699 761	1 699 071

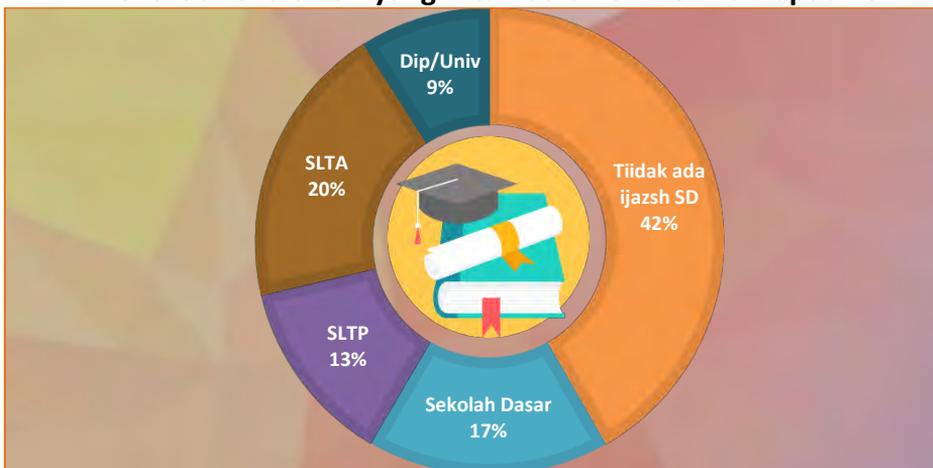
Sumber: Sakernas, Agustus 2017

5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Selain dapat dibedakan menurut kelompok umur, dalam ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut tingkat pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat.

Pada tahun 2017, lebih dari separuh penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah, bahkan 42 persen dari total penduduk yang bekerja merupakan penduduk yang tidak punya ijazah SD. Persentase Penduduk bekerja yang berpendidikan SD sebanyak 17 persen. Sedangkan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA berturut-turut mempunyai persentase 13 persen dan 20 persen. Sementara penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas hanya 9 persen.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua 2017



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Tabel 5.2 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua 2017

Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	15 891	21 506	18 870	42 933	99 200
Jayawijaya	75 522	16 056	15 342	33 150	140 070
Kab. Jayapura	3 881	5 204	8 797	25 701	43 583
Nabire	7 787	13 565	14 013	30 364	65 729
Kepulauan Yapen	5 869	8 690	6 455	20 981	41 995
Biak Numfor	4 096	11 457	11 363	30 372	57 288
Paniai	60 913	6 592	12 150	26 652	106 307
Puncak Jaya	32 506	25 948	13 941	10 024	82 419
Mimika	6 715	14 026	16 206	55 058	92 005
Boven Digoel	5 434	7 864	5 958	10 780	30 036
Mappi	16 074	15 315	6 749	8 467	46 605
Asmat	26 457	15 167	4 451	2 420	48 495
Yahukimo	64 579	29 776	8 654	8 056	111 065
Pegunungan Bintang	28 142	7 456	2 691	5 246	43 535
Tolikara	51 933	10 073	9 143	13 268	84 417
Sarmi	3 259	4 461	2 826	7 402	17 948
Keerom	8 216	7 623	3 912	8 782	28 533
Waropen	672	2 135	2 153	5 821	10 781
Supiori	1 208	1 902	1 918	3 252	8 280
Mamberamo Raya	3 107	3 450	1 805	1 175	9 537
Nduga	44 772	5 959	3 823	1 967	56 521
Lanny Jaya	89 914	4 801	6 966	10 923	112 604
Mamberamo Tengah	20 249	4 343	3 837	2 599	31 028
Yalimo	12 969	3 311	2 986	4 600	23 866
Puncak	39 841	6 535	6 965	15 139	68 480
Dogiyai	31 040	10 669	8 216	5 826	55 751
Intan Jaya	14 942	2 503	3 249	4 783	25 477
Deiyai	25 958	4 015	5 585	6 230	41 788
Kota Jayapura	7 077	13 630	9 649	85 372	115 728
Jumlah (Papua)	709 023	284 032	218 673	487 343	1 699 071

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Begitu juga jika melihat tingkat pendidikan pekerja menurut kabupaten/kota yang disajikan pada tabel 5.2 di atas. Wilayah pegunungan cenderung memiliki banyak pekerja berpendidikan kurang dari SD dan tamat SD. Salah satunya Kabupaten Nduga bahkan menyumbang pekerja dengan tamatan SD ke bawah yang mencapai 50.731 orang atau 89,76 persen dibandingkan tamatan SMP maupun SMA keatas di kabupaten tersebut. Dari tabel diatas dapat dikatakan persebaran kualitas pendidikan pekerja yang ada di Papua terbilang masih rendah terutama di area pegunungan. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh minimnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut. Merupakan tugas berat namun bukan hal mustahil bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pekerjanya.

Di sisi lain, Pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi (diploma ke atas) masih menjadi fenomena cukup langka terutama di daerah pegunungan. Hal ini disebabkan pekerja yang berpendidikan tinggi di daerah tersebut cenderung bermigrasi mencari pekerjaan yang sesuai kemampuan pendidikannya. Pekerja dengan kualifikasi pendidikan diploma ke atas hanya sebesar 9,01 persen se-Papua. Pekerja tersebut lebih banyak mendiami daerah perkotaan, seperti Kota Jayapura, Merauke dan Kabupaten Mimika yang memiliki lapangan pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikan tinggi dan sarana prasarana lebih memadai.

5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan BPS mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Untuk memudahkan dalam analisis, publikasi ini menggunakan pengelompokan lapangan usaha dalam tiga kelompok, yaitu pertanian, industri, dan Jasa. Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 di bawah menggambarkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kota/desa dan lapangan pekerjaan utama.

Tabel 5.3 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua 2017

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri/ Manufaktur	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	44 523	12 708	41 969	99 200
Jayawijaya	112 910	1 794	25 366	140 070
Kab. Jayapura	16 546	4 516	22 521	43 583
Nabire	27 038	6 237	32 454	65 729
Kepulauan Yapen	18 926	7 674	15 395	41 995
Biak Numfor	17 525	5 584	34 179	57 288
Paniai	84 272	1 711	20 324	106 307
Puncak Jaya	73 774	1 385	7 260	82 419
Mimika	12 024	25 172	54 809	92 005
Boven Digoel	15 111	5 092	9 833	30 036
Mappi	35 111	1 397	10 097	46 605
Asmat	42 474	1 021	5 000	48 495
Yahukimo	106 308	351	4 406	111 065
Pegunungan Bintang	38 717	305	4 513	43 535
Tolikara	76 558	241	7 618	84 417
Sarmi	7 299	2 116	8 533	17 948
Keerom	19 863	2 076	6 594	28 533
Waropen	3 493	944	6 344	10 781
Supiori	5 547	540	2 193	8 280
Mamberamo Raya	8 639	88	810	9 537
Nduga	56 521	0	0	56 521
Lanny Jaya	109 540	0	3 064	112 604
Mamberamo Tengah	30 467	0	561	31 028
Yalimo	21 418	0	2 448	23 866
Puncak	53 544	3 047	11 889	68 480
Dogiyai	54 650	263	838	55 751
Intan Jaya	23 404	0	2 073	25 477
Deiyai	32 144	3 331	6 313	41 788
Kota Jayapura	14 982	10 092	90 654	115 728
Jumlah (Papua)	1 163 328	97 685	438 058	1 699 071

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Tabel 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua 2017

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	44,9	12,8	42,3	100
Jayawijaya	80,6	1,3	18,1	100
Kab. Jayapura	38,0	10,4	51,7	100
Nabire	41,1	9,5	49,4	100
Kepulauan Yapen	45,1	18,3	36,7	100
Biak Numfor	30,6	9,7	59,7	100
Paniai	79,3	1,6	19,1	100
Puncak Jaya	89,5	1,7	8,8	100
Mimika	13,1	27,4	59,6	100
Boven Digoel	50,3	17,0	32,7	100
Mappi	75,3	3,0	21,7	100
Asmat	87,6	2,1	10,3	100
Yahukimo	95,7	0,3	4,0	100
Pegunungan Bintang	88,9	0,7	10,4	100
Tolikara	90,7	0,3	9,0	100
Sarmi	40,7	11,8	47,5	100
Keerom	69,6	7,3	23,1	100
Waropen	32,4	8,8	58,8	100
Supiori	67,0	6,5	26,5	100
Mamberamo Raya	90,6	0,9	8,5	100
Nduga	100,0	0,0	0,0	100
Lanny Jaya	97,3	0,0	2,7	100
Mamberamo Tengah	98,2	0,0	1,8	100
Yalimo	89,7	0,0	10,3	100
Puncak	78,2	4,4	17,4	100
Dogiyai	98,0	0,5	1,5	100
Intan Jaya	91,9	0,0	8,1	100
Deiyai	76,9	8,0	15,1	100
Kota Jayapura	12,9	8,7	78,3	100
Jumlah (Papua)	68,5	5,7	25,8	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2017, persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 1.163.328 orang atau sekitar 68,5 persen dari total seluruh pekerja. Sementara itu, sektor berikutnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Papua adalah sektor jasa dengan jumlah pekerja sebanyak 438.058 orang atau sekitar 25,8 persen. Kemudian pekerja yang bekerja pada sektor industri hanya sekitar 5,7 persen. Meskipun pada dasarnya nilai kontribusi terbesar perekonomian Papua berasal dari sektor manufaktur berupa pertambangan, namun kenyataannya tenaga kerja yang terserap di sektor ini hanya sedikit.

Jika dibandingkan secara umum dalam struktur perekonomian Papua, pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja. Namun jika ditinjau menurut kabupaten/kota di Papua, pekerja di sektor pertanian pada daerah perkotaan mulai mengalami pergeseran ke sektor sekunder. Gambaran mengenai persentase pekerja menurut lapangan usaha dan topografi wilayah tersaji pada Gambar 5.5.

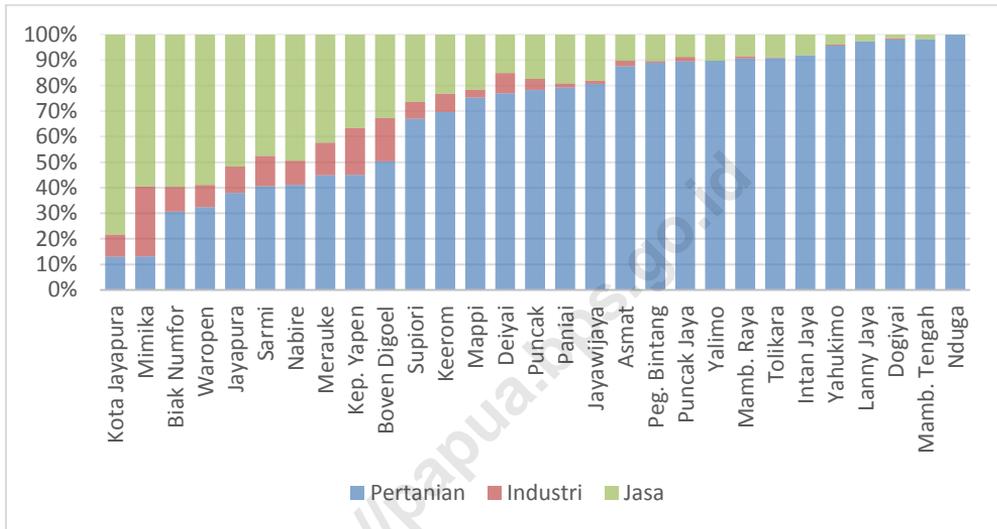
- *Sektor Pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.*
- *Akan tetapi, pada daerah perkotaan sudah mengalami pergeseran dari pertanian ke industri dan jasa.*

Pergeseran struktur perekonomian dari pertanian ke sektor industri dan jasa umumnya terjadi di daerah dengan tingkat geografis mudah. Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, sebagian besar pekerja berada pada sektor jasa (78,33 persen), sedangkan sektor pertanian hanya sekitar 12,95 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Biak Numfor, Mimika dan Waropen di mana mayoritas pekerja terserap di sektor jasa (lebih dari 58 persen).

Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di kabupaten-kabupaten dengan topografi pegunungan. Kabupaten tersebut mempunyai persentase pekerja pertanian lebih dari 95 persen bahkan 100 persen. Yaitu antara lain Kabupaten Yahukimo, Lanny Jaya, Dogiyai, Mamberamo Tengah, dan Nduga. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik

berikut ini. Walaupun sektor pertanian masih unggul dalam penyerapan tenaga kerja, namun pada gambar dibawah ini terlihat jelas adanya pola perubahan lapangan usaha yang terbentuk pada Kabupaten/Kota.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan usaha



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan pendidikannya, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengelompok di sektor pertanian. Walaupun ada juga pekerja dengan pendidikan lulusan perguruan tinggi yang termasuk ke dalam sektor ini, yaitu sebanyak 7.696 orang atau sekitar 0,66 persen. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama adalah karena terbatasnya lapangan usaha lain, sehingga mereka terpaksa bekerja di sektor pertanian. Kedua, bisa jadi mereka berperan sebagai pengusaha di bidang pertanian (bukan sebagai buruh tani).

Tabel 5.5 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	670 400	227 138	147 279	110 815	7 696	1 163 328
Pertambangan ²⁾	953	1 600	2 827	8 846	2 547	16 773
Industri	6 525	8 007	6 116	13 959	3 310	37 917
LGA ³⁾	0	0	290	1 229	113	1 632
Konstruksi	4 579	5 277	9 500	19 396	2 611	41 363
Perdagangan ⁴⁾	14 963	24 238	29 981	57 900	9 179	136 261
Transportasi ⁵⁾	2 914	8 958	11 013	25 659	4 753	53 297
Lembaga Keuangan ⁶⁾	496	109	1 015	7 474	8 173	17 267
Jasa ⁷⁾	8 193	8 705	10 652	88 938	114 745	231 233
Jumlah	709 023	284 032	218 673	334 216	153 127	1 699 071

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Jika pembahasan lapangan usaha kita perluas sektornya, secara umum tampak bahwa sektor-sektor selain sektor pertanian, lebih membutuhkan spesifikasi pendidikan dengan level yang lebih tinggi dari SD. Misalnya pada sektor pertambangan, mayoritas pekerja yang terserap sekitar 52,74 persen adalah lulusan SLTA. Bahkan untuk sektor Lembaga keuangan dan jasa, pekerja yang diserap umumnya berlatar belakang pendidikan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dilihat di Tabel 5.6, penyerapan pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi di sektor ini masing-masing 47,33 dan 49,62 persen.

Tabel 5.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2017

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	57,63	19,52	12,66	9,53	0,66	100
Pertambangan ²⁾	5,68	9,54	16,85	52,74	15,19	100
Industri	17,21	21,12	16,13	36,81	8,73	100
LGA ³⁾	0,00	0,00	17,77	75,31	6,92	100
Konstruksi	11,07	12,76	22,97	46,89	6,31	100
Perdagangan ⁴⁾	10,98	17,79	22,00	42,49	6,74	100
Transportasi ⁵⁾	5,47	16,81	20,66	48,14	8,92	100
Lembaga Keuangan ⁶⁾	2,87	0,63	5,88	43,28	47,33	100
Jasa ⁷⁾	3,54	3,76	4,61	38,46	49,62	100
Jumlah	41,73	16,72	12,87	19,67	9,01	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

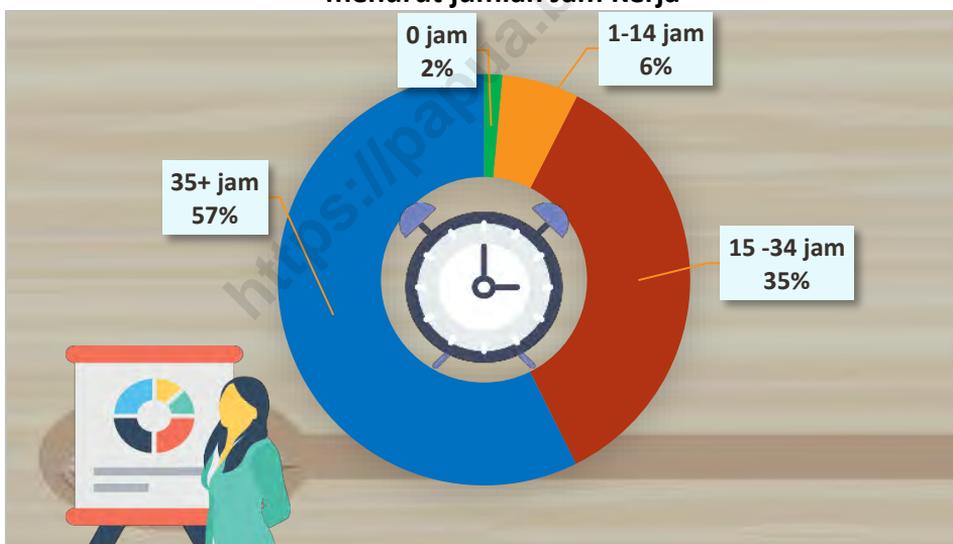
Keterangan:

- 1 : Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2 : Pertambangan dan Penggalian
- 3 : Listrik, Gas, Uap, dan Air
- 4 : Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 5 : Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 6 : Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 7 : Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

5.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja

Salah satu indikator untuk melihat produktivitas pekerja adalah dengan melihat jumlah jam kerja. Hal ini berguna untuk mengetahui proporsi penduduk bekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja “murni” dan proporsi penduduk bekerja namun dikategorikan pengangguran karena jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal. Konsep yang umum digunakan mengenai jumlah jam kerja yaitu, seseorang dikatakan murni bekerja apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu.

Gambar 5.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut jumlah Jam Kerja



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Secara keseluruhan persentase pekerja terbesar bekerja di atas 35 jam selama seminggu yang lalu yaitu 57 persen. Sementara itu pekerja dengan jam kerja antara 1 sampai 34 jam ada sebanyak 41 persen atau dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Sedangkan pekerja yang sementara tidak bekerja mempunyai persentase sekitar 1 persen.

Tabel 5.7 berikut menyajikan gambaran mengenai jumlah pekerja menurut jumlah jam kerja dan lapangan usaha. Secara umum, sebagian besar pekerja memiliki jam kerja normal (di atas 35 jam). Khusus pada sektor pertanian, jumlah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (1-34 jam) lebih banyak dibandingkan pekerja dengan jam kerja normal. Namun bila dilihat ternyata selisih jumlah pekerja jumlah yang tidak terpaut jauh, yaitu masing-masing secara persentase 50,56 persen dan 48,52 persen. Sebaliknya, pada sektor-sektor lain minimal 65 persen pekerjanya bekerja pada jam kerja normal.

Tabel 5.7 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2017

Lapangan Usaha	Jumlah Jam Kerja			Jumlah
	Sementara tidak bekerja (0 jam)	Di bawah jam kerja normal (1-34 jam)	Jam kerja normal (≥ 35 jam)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	10 619	588 237	564 472	1 163 328
Pertambangan	1 839	1 016	13 918	16 773
Industri	40	13 217	24 660	37 917
LGA	0	214	1 418	1 632
Konstruksi	1 820	3 952	35 591	41 363
Perdagangan	3 443	25 963	106 855	136 261
Transportasi	1 265	7 093	44 939	53 297
Lembaga Keuangan	83	3 165	14 019	17 267
Jasa	5 440	57 065	168 728	231 233
Jumlah	24 549	699 922	974 600	1 699 071
Persentase (%)	1,44	41,19	57,36	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

5.6 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Salah satu kegunaan dalam menganalisis status pekerjaan seseorang adalah untuk mengetahui pekerja tersebut termasuk di sektor informal atau formal.

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2017, tercatat bahwa status pekerjaan mayoritas pekerja di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/ tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai persentase 32,44 persen dan 30,65 persen. Selanjutnya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 20,86 persen.

Gambar 5.7 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin



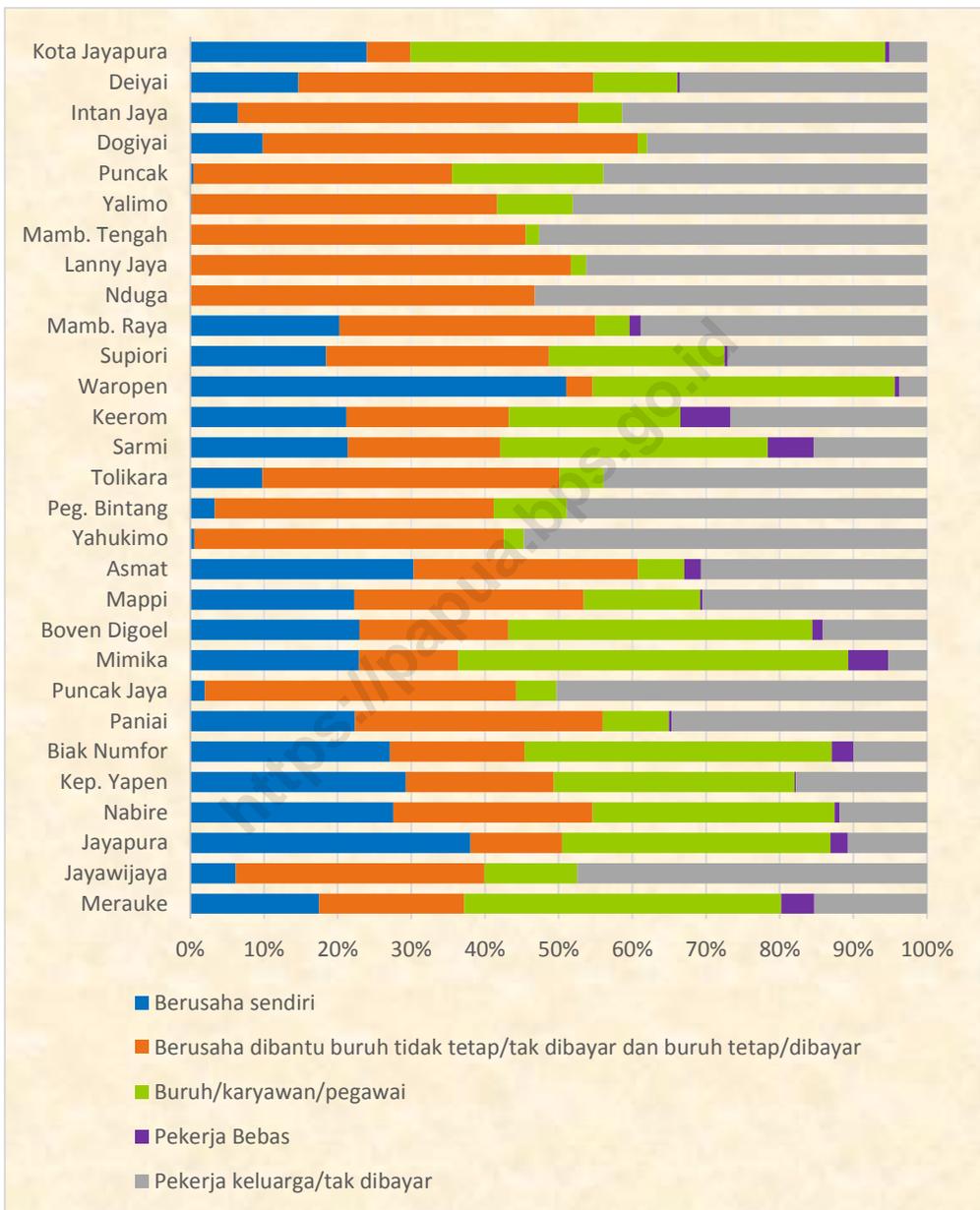
Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Apabila penduduk bekerja ditinjau menurut jenis kelaminnya, maka pekerja perempuan lebih banyak terlibat sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Persentase perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar besarnya adalah 79,11 persen, dan sisanya 20,89 adalah laki-laki. Ketimpangan lain yaitu pada status buruh/karyawan/pegawai, di mana proporsi laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Laki-laki yang berstatus sebagai buruh/karyawan ada sebanyak 263.290 orang (74,30

persen), sementara perempuan hanya sebanyak 91.073 orang (25,70 persen). Hal ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum laki-laki masih lebih dominan dalam hal pekerjaan yang layak. Meskipun pada status pekerja keluarga perempuan lebih mendominasi, namun kenyataannya mereka tidak menerima upah atau penghasilan dari apa yang mereka kerjakan.

<https://papua.bps.go.id>

Gambar 5.8 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan di Provinsi Papua 2017

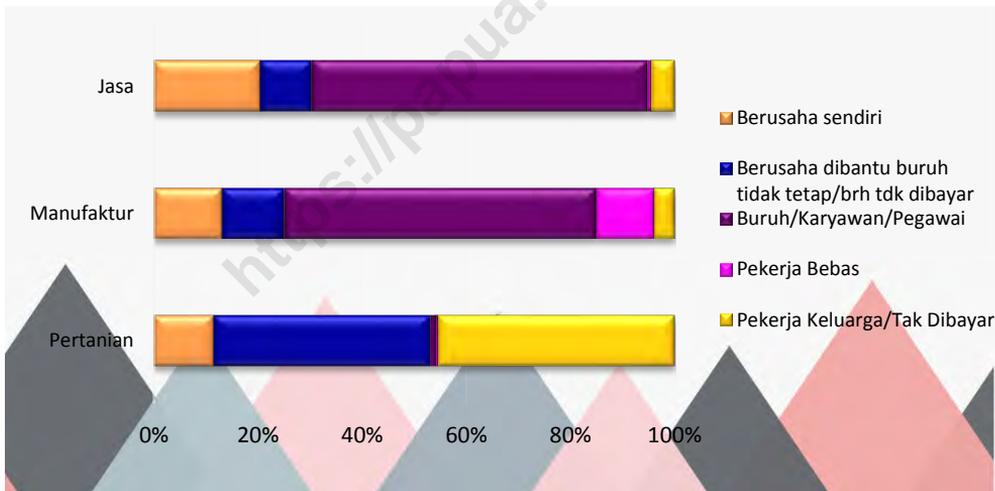


Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Gambaran mengenai distribusi pekerja menurut status pekerjaan menurut topografi disajikan pada Gambar 5.8 di atas. Pada daerah perkotaan atau dataran mudah terlihat bahwa mayoritas penduduknya bekerja dengan status buruh//karyawan. Lain halnya dengan wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamberamo Tengah, Nduga, Yahukimo, Puncak Jaya dan Lanny Jaya mempunyai kecenderungan bahwa mayoritas pekerjaannya adalah pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Di sisi lain, di daerah pegunungan, penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan relatif sedikit.

Sebagian besar pekerja di pegunungan berstatus sebagai pekerja keluarga

Gambar 5.9 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua 2017



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

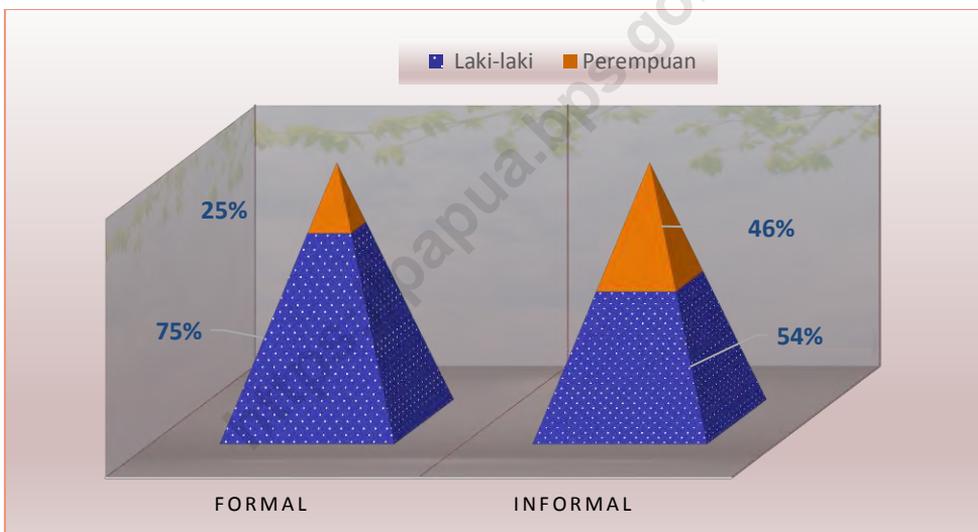
Jika ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, maka jelas terlihat perbedaan status pekerjaan antara pertanian, manufaktur, dan jasa pada gambar 5.9 diatas. Sebagian besar pekerja pertanian berstatus sebagai pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, masing-masing memiliki persentase 45,32 persen dan 41,31 persen. Sementara itu sektor manufaktur lebih didominasi oleh pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan di mana persentasenya mencapai 59,73 persen. Demikian

halnya dengan sektor jasa sebanyak 64,27 persennya merupakan pekerja dengan status buruh/karyawan.

5.7 Penduduk Bekerja menurut Sektor Fomal Informal

Sesuai dengan definisi yang dijelaskan pada Bab II tentang klasifikasi sektor formal dan informal, hanya sekitar 21,81 persen penduduk bekerja di sektor formal, sisanya 78,19 persen merupakan pekerja sektor informal.

Gambar 5.10 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, jelas terlihat bahwa sektor formal dan informal lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Tercatat peranan laki-laki di sektor informal sebesar 54 persen dibandingkan perempuan yang hanya menyumbangkan 46 persen. Bila dikaji dari kedua sektor, jumlah pekerja sektor informal pada tahun 2017 mencapai 1,328,573 orang atau selisih 56,39 persen lebih banyak dibandingkan pada sektor formal. Hal ini mengindikasikan banyak penduduk diatas 15 tahun yang lebih memilih bekerja pada sektor informal.

Banyaknya pekerja di sektor informal sangat berkaitan dengan banyaknya penduduk bekerja pada sektor pertanian. Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa sektor pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua. Banyaknya penduduk bekerja di sektor pertanian, terutama yang berstatus pekerja tidak dibayar menyebabkan tingginya persentase pekerja sektor informal.

Gambar 5.11 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2017



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Bila dilihat persebaran pekerja formal dan informal berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dapat diketahui bahwa pekerja formal lebih banyak di daerah perkotaan atau daerah dataran mudah dengan Kota Jayapura memimpin 65,78 persen. Sedangkan pekerja informal lebih banyak menyebar di daerah pegunungan dengan Kabupaten Nduga sebagai kabupaten 100 persen pekerjaanya berstatus informal.

<https://papua.bps.go.id>

BAB 6

PENGANGGURAN

BAB VI

PENGANGGURAN

6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur

Pengangguran secara konsepsi merupakan bagian dari angkatan kerja. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Pada tahun 2017, jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Papua adalah sebanyak 63.770 orang atau sebesar 3,62 persen dari total angkatan kerja. Banyak pemerhati ketenagakerjaan berpendapat bahwa nilai ini terlalu kecil. Namun, perlu diingat kembali dalam konsep bahwa seseorang yang bekerja membantu bekerja asalkan lebih dari 1 jam dalam satu minggu tetap tergolong sebagai bekerja.

Jumlah pengangguran di Papua sebesar 63.770 orang

Gambar 6.1 berikut menggambarkan jumlah pengangguran yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Secara umum, jumlah pengangguran paling tinggi berada pada kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini ditengarai karena banyaknya output dari dunia pendidikan

Pengangguran terbanyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun

yang tidak langsung terserap dalam pasar tenaga kerja. Pada segmen kelompok umur tersebut banyak pemuda-pemudi yang masih harus mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pengangguran tertinggi baik pada kelompok perempuan maupun laki-laki juga terjadi di usia 20-24 tahun, yaitu masing-masing 8.305 dan 14.502 orang.

Gambar 6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

6.2 Pengangguran menurut Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, sebagian besar pengangguran di Papua adalah laki-laki yaitu 40.877 orang atau sekitar 64.12 persen. Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, pengangguran terbanyak terjadi di Kota Jayapura sebesar 16.369 orang (25,67 persen). Hal ini terjadi karena banyak penduduk dari berbagai kabupaten yang datang untuk mencari pekerjaan di wilayah ibukota provinsi. Besarnya anggapan lebih banyak peluang dan fasilitas yang disediakan dibandingkan dengan wilayah lainnya menyebabkan banyak pencari kerja ke Kota Jayapura mencoba peruntungan kerja.

Pada beberapa kabupaten terjadi fenomena angka penganggurannya menyentuh nol persen. Artinya semua angkatan kerja terserap seluruhnya dalam pasar tenaga kerja yang tersedia. Kabupaten tersebut antara lain : Yahukimo dan Mamberamo Tengah. Jika ditinjau lebih dalam, kedua kabupaten yang meraih angka pengangguran nol persen tersebut adalah kabupaten yang masuk kategori wilayah pegunungan dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Tabel 6.1 Pengangguran menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	1 340	1 899	3 239
Jayawijaya	581	255	836
Kab. Jayapura	4 877	1 859	6 736
Nabire	4 424	1 547	5 971
Kepulauan Yapen	1 193	910	2 103
Biak Numfor	2 304	2 226	4 530
Paniai	129	264	393
Puncak Jaya	103	443	546
Mimika	5 705	1 969	7 674
Boven Digoel	1 026	620	1 646
Mappi	1 572	1 609	3 181
Asmat	148	0	148
Yahukimo	0	0	0
Pegunungan Bintang	664	508	1 172
Tolikara	625	123	748
Sarmi	1 026	540	1 566
Keerom	839	310	1 149
Waropen	279	119	398
Supiori	286	199	485
Mamberamo Raya	237	477	714
Nduga	785	198	983
Lanny Jaya	502	0	502
Mamberamo Tengah	0	0	0
Yalimo	575	385	960
Puncak	243	179	422
Dogiyai	427	0	427
Intan Jaya	57	232	289
Deiyai	439	144	583
Kota Jayapura	10 501	5 868	16 369
Jumlah (Papua)	40 887	22 883	63 770

Sumber: Sakernas Agustus 2017

6.3 Pengangguran menurut Keegiatannya

Pengangguran menurut kegiatannya terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/ merasa tidak mungkin dapat kerja, dan sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tabel 6.2 berikut menyajikan gambaran tentang jumlah pengangguran menurut jenis kelamin dan kegiatannya.

Tabel 6.2 Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencari Pekerjaan	25 393	16 346	41 739	65,45%
Mempersiapkan Usaha	429	691	1 120	1,76%
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja	12 259	4 744	17 003	26,66%
Sudah punya tapi belum mulai kerja	2 806	1 102	3 908	6,13%
Jumlah	40 887	22 883	63 770	100 %

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Bila dilihat menurut kegiatannya, dari seluruh pengangguran di Papua, persentase terbesar adalah yang mencari pekerjaan sekitar 65,45 persen. Mereka yang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah pernah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; serta mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar pengangguran adalah mencari pekerjaan

Persentase terkecil terdapat pada kegiatan mempersiapkan usaha, yaitu sebesar 1,76 persen. Mempersiapkan usaha cenderung pada pekerjaan

yang berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap atau berusaha dibantu buruh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penduduk untuk berwiraswasta atau membuka usaha sendiri sangat kecil, dan mereka lebih memilih mencari pekerjaan daripada membuka lapangan usaha. Di samping itu ada sebanyak 6,13 persen pengangguran yang sudah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. Hampir pasti angka ini akan bergeser dari status sebagai pengangguran menjadi bekerja.

6.4 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan



Total **Pengangguran berijazah (SLTA+) di Papua** mencapai

33.240 orang

(Sakernas, Agustus 2017)

Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui sarana pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang termasuk angkatan kerja akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat produktivitas dalam pekerjaannya. Untuk itu analisis pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terdidik merupakan indikator dari besarnya jumlah dan persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi di suatu wilayah. Secara absolut, jumlah pengangguran di Papua terdistribusi di semua jenjang pendidikan, seperti disajikan pada gambar 6.2. Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan SLTA/ sederajat, yaitu sebesar 52,12 persen. Selanjutnya adalah diploma/ universitas sebesar 18,11 persen.

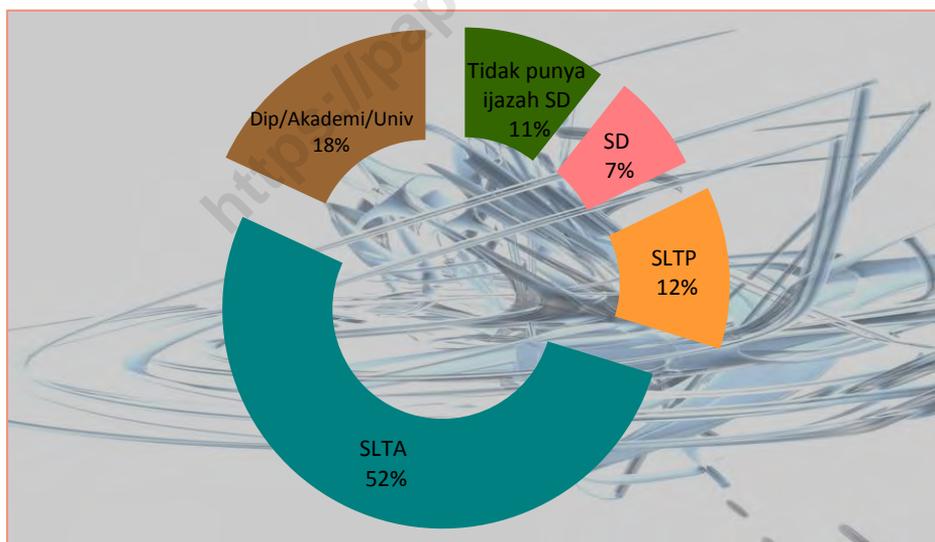
Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan tinggi

Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi lebih disebabkan karena mereka lebih bersifat selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai

dengan pendidikan dan atau keterampilan yang mereka miliki. Seringkali terjadi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, mereka memiliki kecenderungan untuk lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal daripada informal, sehingga menyebabkan angka pengangguran yang berpendidikan menengah/tinggi lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah.

Dari sisi permintaan pasar tenaga kerja, tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi akan berdampak pada pemberian upah kerja yang lebih tinggi pula. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja cenderung lebih besar untuk pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, terutama lulusan SLTP, SD dan dibawah SD.

Gambar 6.2 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2017



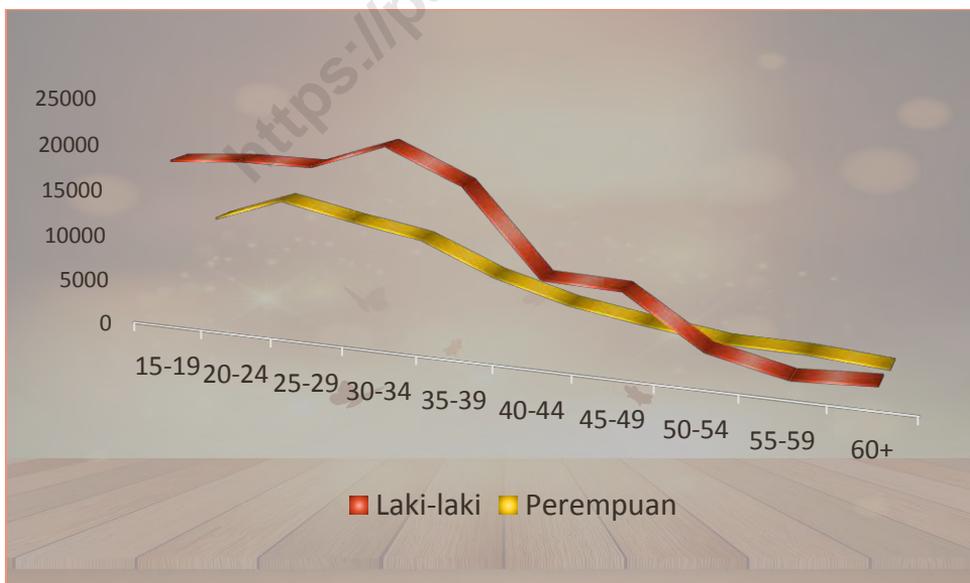
Sumber: Sakernas, Agustus 2017

6.5 Setengah Pengangguran

Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dikategorikan dalam kelompok setengah pengangguran. Jumlah setengah pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2017 adalah sebanyak 699.922 orang, yang terdiri dari 173.722 orang setengah penganggur terpaksa (24,82 persen) dan 526.200 orang setengah penganggur sukarela (75.18 persen).

Dalam kenyataannya setengah pengangguran sukarela tidak terlalu diperhitungkan dalam kategori pengangguran. Hal ini karena setengah penganggur sukarela memang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, meskipun jam kerjanya kurang dari jam kerja normal.

Gambar 6.3 Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017



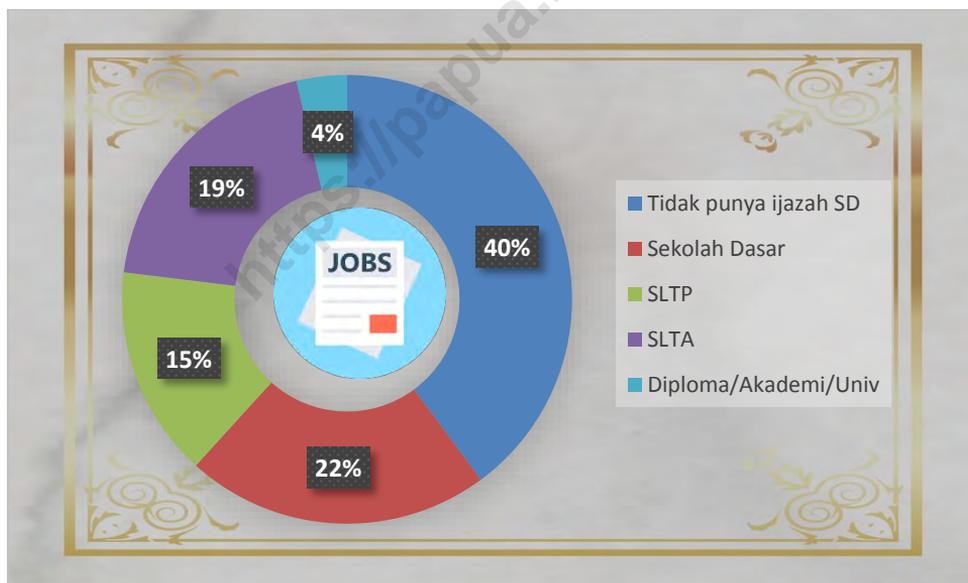
Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Setengah penganggur terpaksa paling banyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun (30.806 orang). Pada kelompok usia ini, kecenderungan

mencari pekerjaan atau menerima tawaran pekerjaan lain masih tinggi. Artinya mereka yang masih bekerja di bawah jam kerja normal masih punya keinginan untuk menambah pekerjaan lain (paruh waktu) atau mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai. Dengan semakin meningkatnya umur, maka jumlah setengah penganggur pun semakin menurun.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum jumlah penganggur terpaksa lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Hal ini terjadi di semua kategori kelompok umur, namun paling menonjol pada usia 30-34 tahun dan secara perlahan keduanya menurun menjelang usia 50 tahun.

Gambar 6.4 Persentase Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Berbeda dengan pengangguran terbuka, sebagian besar setengah penganggur terpaksa justru didominasi berpendidikan SD kebawah atau tidak memiliki ijazah SD, yaitu sekitar 62 persen. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung bekerja seadanya, dan masih mencari pekerjaan yang lebih baik karena tuntutan ekonomi.

<https://papua.bps.go.id>

BAB 7

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

BAB VII

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada tahun 2017 adalah sebesar 76,94 persen. Umumnya TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada level provinsi, TPAK laki-laki adalah 85,28 persen, sementara perempuan 67,45 persen. Begitu juga TPAK pada Kabupaten/Kota, di mana partisipasi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

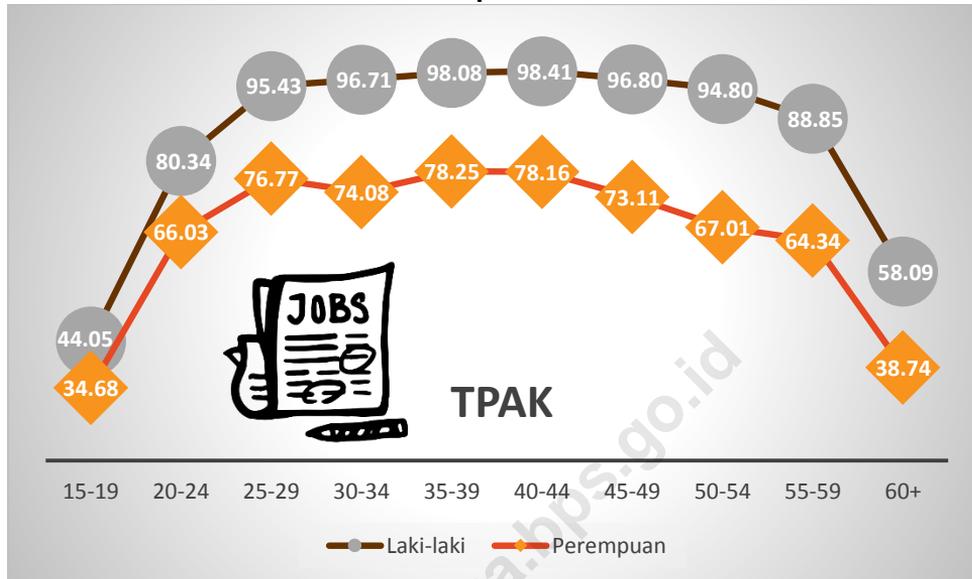
Pada tahun 2017, TPAK Provinsi Papua adalah 76,94 persen

TPAK paling tinggi terdapat di Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu 95,44 persen, dan terendah di Kabupaten Waropen sebesar 54,95 persen. Tingginya TPAK di Kabupaten Nduga antara lain dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Partisipasi perempuan untuk aktif secara ekonomi pada setiap kelompok umur selalu lebih rendah daripada laki-laki

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, maka tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi selalu lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Partisipasi laki-laki paling tinggi adalah pada usia 40-44 tahun (98,41 persen). Hal ini berarti usia puncak pada laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi adalah antara umur 40-44 tahun, sedangkan untuk perempuan antara umur 35-39 tahun (78,25 persen).

Gambar 7.1 TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Tabel 7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Kabupaten/Kota	TPAK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	81,69	43,92	63,62
Jayawijaya	92,42	86,99	89,79
Kab. Jayapura	71,65	36,78	55,52
Nabire	80,52	53,33	68,09
Kepulauan Yapen	80,18	54,28	67,68
Biak Numfor	74,53	46,23	60,97
Paniai	90,90	89,84	90,39
Puncak Jaya	91,47	87,69	89,79
Mimika	84,36	39,64	65,83
Boven Digoel	82,83	54,07	70,20
Mappi	89,14	75,80	82,60
Asmat	90,51	76,16	83,54
Yahukimo	93,02	81,02	87,21
Pegunungan Bintang	92,95	88,48	90,82
Tolikara	92,49	88,29	90,56
Sarmi	85,79	55,13	72,05
Keerom	84,89	61,80	74,57
Waropen	79,51	28,44	54,95
Supiori	83,54	56,17	70,39
Mamberamo Raya	87,69	57,36	73,12
Nduga	91,64	92,19	91,89
Lanny Jaya	91,89	95,53	93,60
Mamberamo Tengah	93,93	97,10	95,44
Yalimo	60,52	53,97	57,48
Puncak	94,31	89,64	92,08
Dogiyai	91,25	88,11	89,66
Intan Jaya	90,16	62,90	76,74
Deiyai	91,00	82,88	86,98
Kota Jayapura	73,87	42,20	59,51
Jumlah (Papua)	85,28	67,45	76,94

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator penting berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. TPT Provinsi Papua pada tahun 2017 adalah sebesar 3,62 persen terhadap total angkatan kerja. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, kelompok umur dengan nilai TPT tertinggi berada pada rentang usia 20-24 tahun dengan nilai TPT 13,13. Hal ini disebabkan penduduk angkatan kerja yang berada pada kelompok umur tersebut belum terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan cenderung memilih bersekolah ataupun mengurus rumah tangga sehingga nilai TPT relatif tinggi. Sedangkan kelompok umur 55 tahun ke atas memiliki TPT 0,67 persen. Artinya pengangguran di kelompok usia tersebut sangat rendah

**Tabel 7.2 Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT)
menurut Kelompok umur Tahun 2017**



Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Jika ditinjau per kabupaten/kota, tingkat pengangguran paling tinggi ada di Kabupaten Jayapura sebesar 13,39 persen. Menyusul berikutnya adalah Kota Jayapura sebesar 12,39 persen. Di sisi lain, pada kabupaten di daerah pegunungan, seperti Kabupaten Mamberamo Tengah dan Yahukimo

memiliki TPT nol persen. Artinya hampir tidak ada pengangguran di kabupaten-kabupaten tersebut.

**Tabel 7.2 Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT)
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2017**

Kabupaten/Kota	TPT		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	1,95	5,61	3,16
Jayawijaya	0,78	0,39	0,59
Kab. Jayapura	13,98	12,05	13,39
Nabire	9,61	6,03	8,33
Kepulauan Yapen	4,41	5,33	4,77
Biak Numfor	5,86	9,91	7,33
Paniai	0,23	0,52	0,37
Puncak Jaya	0,22	1,23	0,66
Mimika	7,63	7,92	7,70
Boven Digoel	4,89	5,78	5,20
Mappi	5,74	7,18	6,39
Asmat	0,55	0,00	0,30
Yahukimo	0,00	0,00	0,00
Pegunungan Bintang	2,77	2,45	2,62
Tolikara	1,33	0,32	0,88
Sarmi	8,00	8,07	8,03
Keerom	4,49	2,82	3,87
Waropen	3,32	4,28	3,56
Supiori	5,29	5,92	5,53
Mamberamo Raya	3,71	12,35	6,97
Nduga	2,49	0,76	1,71
Lanny Jaya	0,86	0,00	0,44
Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00
Yalimo	4,10	3,56	3,87
Puncak	0,66	0,56	0,61
Dogiyai	1,51	0,00	0,76
Intan Jaya	0,37	2,23	1,12
Deiyai	1,96	0,72	1,38
Kota Jayapura	11,72	13,82	12,39
Jumlah (Papua)	3,93	3,17	3,62

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Semakin kecil persentase TPT menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha/sector, juga mencerminkan kestabilan suatu daerah di bidang ketenagakerjaan. Apabila terlalu banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di lapangan usaha, atau lapangan usaha sangat terbatas untuk menyerap tenaga kerja yang terindikasi melalui TPT yang tinggi, maka masalah sosial (kejahatan, demonstrasi dan lainnya) akan sangat rawan.

7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Selain TPAK dan TPT, masih ada satu indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), merupakan persentase tenaga kerja yang terserap pada seluruh sektor-sektor yang ada terhadap angkatan kerja. Dengan kata lain, TKK merupakan selisih TPT terhadap 100 persen.

Semakin tinggi TKK, semakin banyak tenaga kerja yang terserap, akhirnya semakin stabil keadaan suatu daerah dalam hal ketenagakerjaan. Nilai TKK Provinsi Papua Tahun 2017 sebesar 96,38 persen. Dari Tabel 7.3 dapat dilihat nilai TKK berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan jenis kelamin, Nilai TKK perempuan yaitu 96,83 unggul tipis dibandingkan laki-laki yang bernilai 96,07.

TKK Provinsi Papua Tahun 2017 sebesar 96,38 persen menunjukkan penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi

Jika ditinjau berdasarkan Kabupaten/Kota, nilai TKK tertinggi diraih oleh Kabupaten Yahukimo dan Mamberamo Tengah. Kedua kabupaten tersebut menyentuh angka 100. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Papua menunjukkan nilai TKK yang tinggi. Tingginya TKK di Papua disebabkan sebagian besar tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian atau tingkat pendidikan yang cukup tidak langsung menganggur, karena mereka diserap oleh sektor pertanian yang masih tradisional.

Tabel 7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Kabupaten/Kota	TKK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	98,05	94,39	96,84
Jayawijaya	99,22	99,61	99,41
Kab. Jayapura	86,02	87,95	86,61
Nabire	90,39	93,97	91,67
Kepulauan Yapen	95,59	94,67	95,23
Biak Numfor	94,14	90,09	92,67
Paniai	99,77	99,48	99,63
Puncak Jaya	99,78	98,77	99,34
Mimika	92,37	92,08	92,30
Boven Digoel	95,11	94,22	94,80
Mappi	94,26	92,82	93,61
Asmat	99,45	100,00	99,70
Yahukimo	100,00	100,00	100,00
Pegunungan Bintang	97,23	97,55	97,38
Tolikara	98,67	99,68	99,12
Sarmi	92,00	91,93	91,97
Keerom	95,51	97,18	96,13
Waropen	96,68	95,72	96,44
Supiori	94,71	94,08	94,47
Mamberamo Raya	96,29	87,65	93,03
Nduga	97,51	99,24	98,29
Lanny Jaya	99,14	100,00	99,56
Mamberamo Tengah	100,00	100,00	100,00
Yalimo	95,90	96,44	96,13
Puncak	99,34	99,44	99,39
Dogiyai	98,49	100,00	99,24
Intan Jaya	99,63	97,77	98,88
Deiyai	98,04	99,28	98,62
Kota Jayapura	88,28	86,18	87,61
Jumlah (Papua)	96,07	96,83	96,38

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

7.4 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk usia kerja adalah sebanyak 1.989.403 orang, dan meningkat menjadi 2.291.111 orang pada tahun 2017. Selama kurun waktu 2011 hingga 2017, peningkatan penduduk usia kerja selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Menurunnya angka pengangguran yang disertai dengan meningkatnya TPAK adalah pencapaian ideal yang diharapkan. Pada tahun 2012 TPT mencapai sekitar 3,65 persen, dan berfluktuasi sepanjang tahun 2012-2017 menjadi 3,62. Kondisi ini juga mempengaruhi fluktuasi TPAK dari 78,27 persen di tahun 2012 menjadi 76,94 persen di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan kondisi ketenagakerjaan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 7.4 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	1 557 089	1 610 484	1 675 113	1 741 945	1 722 162	1 762 841
Bukan Angkatan Kerja	432 314	462 222	454 291	447 285	523 300	528 270
Usia Kerja	1 989 403	2 072 706	2 129 404	2 189 230	2 245 462	2 291 111
TPAK	78,27	77,7	78,7	79,57	76,70	76,94
TPT	3,65	3,15	3,4	3,99	3,35	3,62
TKK	96,4	96,8	96,6	96,01	96,65	96,38

Sumber: Sakernas, Agustus 2012-2017

7.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Tabel 7.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan			Jumlah
	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	16 060	37 122	5 389	58 571
Jayawijaya	6 474	7 840	1 703	16 017
Kab. Jayapura	13 555	22 043	4 721	40 319
Nabire	11 423	17 494	4 682	33 599
Kepulauan Yapen	7 663	10 282	3 109	21 054
Biak Numfor	12 101	21 220	6 256	39 577
Paniai	5 238	3 506	2 603	11 347
Puncak Jaya	1 483	3 182	4 765	9 430
Mimika	17 386	32 747	1 605	51 738
Boven Digoel	4 140	8 164	1 147	13 451
Mappi	4 002	5 721	766	10 489
Asmat	2 659	6 353	571	9 583
Yahukimo	4 789	8 663	2 837	16 289
Pegunungan Bintang	1 790	1 673	1 054	4 517
Tolikara	3 032	3 794	2 053	8 879
Sarmi	2 429	4 672	468	7 569
Keerom	4 629	5 029	466	10 124
Waropen	2 725	5 881	559	9 165
Supiori	870	2 347	470	3 687
Mamberamo Raya	833	2 491	445	3 769
Nduga	3 725	294	1 059	5 078
Lanny Jaya	5 441	647	1 640	7 728
Mamberamo Tengah	1 156	0	326	1 482
Yalimo	1 918	6 371	10 074	18 363
Puncak	2 612	2 774	540	5 926
Dogiyai	4 024	1 759	696	6 479
Intan Jaya	2 302	5 135	373	7 810
Deiyai	3 290	2 831	221	6 342
Kota Jayapura	34 130	48 021	7 737	89 888
Jumlah (Papua)	181 879	278 056	68 335	528 270

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Bahasan ini sengaja ditampilkan satu bab bersama indikator ketenagakerjaan, sehingga dapat diketahui penyebaran penduduk bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja maupun sementara tidak bekerja. Dengan kata lain yang dikerjakan oleh penduduk bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara keseluruhan, sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Papua adalah mengurus rumah tangga yaitu sebesar 52,64 persen. Selanjutnya penduduk yang bersekolah sebesar 34,43 persen dan yang melakukan kegiatan lainnya ada sebesar 12,94 persen. Kemudian kabupaten/kota yang memiliki penduduk bukan angkatan kerja terbesar adalah Kota Jayapura, yakni 89.888 orang. Kegiatan penduduk yang bukan angkatan kerja di Kota Jayapura didominasi oleh mengurus rumah tangga, yaitu sebanyak 53,42 persen.

BAB 8

KESIMPULAN

<https://mapua.bps.go.id>

BAB VIII

KESIMPULAN

Tujuan disusunnya publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran ketenagakerjaan di Provinsi Papua pada tahun 2017. Berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh dari publikasi ini:

i. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja di Papua pada tahun 2017 mencapai 2.291.111 orang, di mana persentase penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan jumlah terbesar penduduk usia kerja terdapat pada kelompok usia muda yaitu 30-34 tahun yang mencapai 14,34 persen. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan penduduk usia kerja selama seminggu yang lalu adalah bekerja dengan persentase sebesar 74,16 persen.

ii. Penduduk Angkatan Kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Papua pada tahun 2017 adalah 1.762.841 orang. Angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 35-39 tahun yang mencapai 16,15 persen. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua masih tergolong rendah, di mana jumlahnya lebih dari separuh dari total angkatan kerja SD Ke bawah, bahkan 40,60 persennya berpendidikan tidak tamat SD atau tidak memiliki ijazah SD.

iii. Penduduk Bekerja

Penduduk bekerja di Papua pada tahun 2017 ada sebanyak 1.699.071 orang atau setara dengan 74,16 persen dari total penduduk usia kerja. Jumlah terbanyak pekerja berada pada usia 35-39 tahun yang besarnya mencapai 280.862 orang atau sekitar 16,53 persen dari seluruh pekerja. Sementara itu, lebih dari separuh pekerja berpendidikan SD ke bawah. Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.

iv. Pengangguran

Jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada tahun 2017 sebanyak 63.770 orang atau sekitar 3,62 persen dari total angkatan kerja, di mana 64,11 persen adalah laki-laki dan sisanya 35,88 persen perempuan. Persentase pengangguran terbanyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun. Sementara itu, lebih dari separuh penganggur adalah berpendidikan tinggi (SLTA ke atas). Menurut kegiatannya, pengangguran karena mencari pekerjaan mempunyai persentase paling besar yaitu sekitar 65,45 persen.

v. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Secara umum TPAK di Provinsi Papua tergolong tinggi, yaitu sebesar 76,94 persen. Tingkat partisipasi laki-laki lebih besar dibanding perempuan di semua kabupaten/kota, kecuali pada Kabupaten Nduga, Lanny Jaya dan Mamberamo Tengah.

vi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2017, TPT Provinsi Papua adalah sebesar 3,62 persen. Kabupaten Jayapura memiliki tingkat pengangguran paling tinggi di Papua, yaitu sebesar 25,62 persen. Sedangkan di beberapa kabupaten di pegunungan mempunyai TPT hampir nol persen.

vii. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dibanding tahun 2016, kondisi ketenagakerjaan di Papua memperlihatkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan TPAK, namun demikian pada rentang waktu yang sama TPT mengalami kenaikan dari 3,35 persen menjadi 3,62 persen

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Statistics of Papua Province

Jl. DR. Samratulangi Dok II Jayapura 99112

Telp. (0967) 533028, 534519 Fax. (0967) 536490

E-mail: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>

ISSN 2477-4553



9 772477 455003